

Kampanye dan Cuti Massal Pejabat

Oleh: Hendra Kurniawan

PEMILU 2014 sudah di depan mata, masa kampanye telah tiba. Para calon legislatif mulai menyosialisasikan diri. Berbagai cara ditempuh bahkan sejak sebelum kampanye yang sesungguhnya dimulai. Entah melalui media cetak, elektronik, bahkan spanduk-spanduk di jalanan. Hampir semuanya tidak mau disebut berkampanye. Bagi mereka cara ini merupakan bentuk sosialisasi atau mengenalkan diri pada masyarakat. Meski demikian sebenarnya yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan kegiatan kampanye.

Effendi Gazali, peneliti komunikasi politik, dalam sebuah artikel pernah mempertanyakan soal kegiatan sosialisasi partai macam ini. UU Pileg mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Maka apabila di radio, televisi, maupun media lain di sudut-sudut kota hanya mengiklankan para caleg atau capres tanpa menyebut visi, misi, dan programnya belum dapat disebut sebagai kampanye.

Dalam berbagai materi sosialisasi tersebut, selain wajah artis maka wajah para pejabat negara jarang sekali absen. Rupanya para pejabat ini bermanfaat untuk melegitimasi caleg maupun capres yang mencalonkan diri dan juga untuk mendulang perolehan suara partai. Tentu mereka tampil dalam kapasitas sebagai pimpinan atau tokoh partai dan bukan sebagai pejabat, namun pada dasarnya jabatan itu telah melekat dalam diri mereka yang kemudian menjadi bagian dari kampanye yang tak mau disebut kampanye itu.

Mulai 16 Maret

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu legislatif dari tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014. Sejumlah kepala

daerah sudah mengajukan cuti. Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan sedikitnya sudah sembilan gubernur dan dua wakil gubernur telah mengajukan cuti kampanye. Sementara itu juga tercatat dua gubernur dan satu wakil gubernur yang tidak dianggap cuti namun diminta melaporkan kegiatan karena izin berkampanye pada hari Sabtu dan Minggu. Di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno. Ini belum terhitung bupati, wakil bupati, walikota, maupun wakil walikota yang juga mengajukan cuti ke gubernur. Misalnya Bupati Bantul Sri Surya Widati yang mengajukan cuti untuk menjadi jurkam dalam kampanye PDI-P tanggal 22 Maret dan 5 April 2014.

Tidak hanya kepala daerah yang akan melakukan turba untuk mengkampanyekan partainya. Setali tiga uang, enam orang menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II telah mengajukan cuti dan sudah disetujui oleh Presiden. Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dari PAN, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian Suswono dari PKS, serta Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan yang menjabat Ketua Harian Partai Demokrat dan Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Itu belum termasuk nama-nama lain dalam kabinet yang juga menjadi tokoh partai dalam Pemilu 2014 namun belum mengajukan cuti. Menko Kesra Agung Laksono dari Partai Golkar, Menteri Agama Surya-

dharma Ali yang menjadi Ketua PPP, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang juga Ketua PKB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat DPP PAN Azwar Abubakar, serta beberapa menteri dari Partai Demokrat seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, juga Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Tak mau ketinggalan, Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat juga telah mengajukan cuti untuk berkampanye mendongkrak suara partainya. Presiden SBY mengambil cuti tanggal 17 dan 18 Maret 2014.

Maka sekitar satu bulan mendatang, beberapa kementerian dan pemerintahan baik di daerah maupun pusat harus pandai-pandai mengatur kinerjanya saat ditinggal oleh sang pimpinan. Para pemangku kekuasaan menjamin bahwa cuti para pejabat ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena tugas-tugas dapat didelegasikan pada wakil, sekda, dirjen, atau pejabat struktural lain di bawahnya. Boleh jadi secara normatif hal itu tidak menjadi masalah namun idealnya perhatian pejabat negara tidak semestinya terbagi.

Pamong dan pelayan

Pejabat negara pada dasarnya adalah pamong dan pelayan masyarakat sehingga dibutuhkan loyalitas, totalitas, dan fokus yang prima pada tugas-tugasnya tersebut. Kinerja mereka tentu tidak akan maksimal ketika masih harus memikirkan politik praktis. Keterlibatan pejabat negara dalam partai politik pasti akan

selalu menimbulkan tarik-menarik berbagai kepentingan partai yang berbeda-beda melalui kadernya yang ada dalam pemerintahan. Apabila hal ini terlalu sering terjadi maka kinerja pemerintahan akan sulit untuk seiring sejalan.

Kebijakan kabinet tidak selalu sinergi dengan keinginan partai. Dengan sendirinya akan memengaruhi pengambilan keputusan dan kinerja kabinet menjadi tidak kompak. Belum lagi antara pusat dengan daerah juga tidak mudah untuk seiya sekata terhadap suatu kebijakan. Terbukti belum lama ini terjadi beberapa kepala daerah yang menentang kebijakan pemerintah pusat misalnya soal mobil murah. Barangkali inilah konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah dan pilkada.

Semestinya akan jauh lebih ideal apabila para pejabat pemerintahan setelah terpilih kemudian melepaskan dirinya dari partai dan mencurahkan perhatian penuh untuk bekerja sebagai pelayan masyarakat. Akan tetapi tampaknya pesimis hal ini dapat terwujud karena bagaimanapun keberhasilan dalam meraih jabatan tidak lepas dari peran partai sebagai kendaraan politik. Padahal apabila disadari lebih dalam, seseorang yang telah dipilih oleh rakyat sebagai pejabat semestinya memiliki loyalitas yang tinggi pada rakyatnya dan bukan melulu pada partai. Bukankah partai itu sejatinya didirikan untuk kemashlathan bangsa dan negara? Maka janji para pejabat untuk tetap memomorsatukan pengabdianya demi kepentingan rakyat hendaknya bukan sekedar retorika belaka. Semoga! ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.